LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KECAMATAN RAWALUMBU KOTA BEKASI





KATA PENGANTAR

Berkat Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi dapat diterbitkan. Dengan telah berakhirnya Tahun 2024 berarti Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun Kelima dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi dalam upaya memenuhi visi dan misinya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dimaksudkan untuk :

- Menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku;
- 2. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien, efektif dan responsif;
- Menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menyangkut kinerja instansi pemerintah;
- 4. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi yang memiliki kewewenangan dalam pemerintahan khususnya pada perencanaan pembangunan daerah yang berperan penting dalam konstelasi perencanaan pembangunan di Kota Bekasi. Peran tersebut sangat terlihat pengaruhnya pada dinamika pembangunan di Kota Bekasi, baik yang berdimensi lokal, regional, dan nasional. Hal ini merupakan perwujudan cita-cita dari visi Kota Bekasi yang Maju, Sejahtera dan Ihsan. Untuk mendukung semua itu, seluruh daya upaya dilakukan melalui beragam aspek, yaitu aspek penguatan integrasi, aspek sosialisasi, aspek pemerintahan umum dan aspek pembinaan aparatur perencanaan pembangunan.

Akhirnya laporan ini dapat tersaji menjadi sarana evaluasi yang konstruktif dan dapat memberi manfaat yang optimal serta dimaknai secara positif oleh seluruh jajaran Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi bagi peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Bekasi 31 Januari 2025 CAMAT RAWALUMBU,

NIA AMINAH KURNIATI, AP., S.IP., M.Si

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19740708 199311 2 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTARii
DAFTAR ISI4
DAFTAR GAMBAR5
DAFTAR TABEL6
RINGKASAN EKSEKUTIF8
BAB I PENDAHULUAN11
1.1 Latar Belakang11
1.2 Tugas Fungsi dan Wewenang Organisasi14
1.3 Aspek Straregis Organisasi16
1.4 Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi17
1.5 Sistematika Penyajian22
BAB II PERENCANAAN KINERJA24
2.1 Rencana Strategis24
2.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah24
2.1.2 Indikator Kinerja Utama26
2.2 Perjanjian Kinerja28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA35
3.1 Capaian Kinerja Organisasi35
3.2. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA37
3.2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik37
3.2.2 Indikator Sasaran Nilai Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP)49
3.2.3 Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib56
3.3 Realisasi Anggaran63
BAB IV PENUTUP66
4.1 Kesimpulan Umum66
4.1.1 Simpulan Capaian Kinerja67
5.2 Rencana Tindak Lanjut67



DAFTAR GAMBAR



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi25
Tabel 2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rawalumbu Tahun 202427
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Kecamatan Rawalumbu Tahun 202429
Tabel 4 Alokasi Anggaran Per Triwulan30
Tabel 5 Capaian Kinerja Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Tahun 202436
Tabel 6 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik38
Tabel 7 Hasil Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester 1 pada Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi39
Tabel 8 Hasil Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester 2 pada Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi40
Tabel 9 Indikator Capaian Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik42
Tabel 10 Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di Kecamatan Rawalumbu Target Renstra 2024-202644
Tabel 11 Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Untuk Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di Kecamatan Rawalumbu45
Tabel 12 Perbandingan Realiasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di Kecamatan Rawalumbu dengan Kecamatan lain48
Tabel 13 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Nilai AKIP di Kecamatan Rawalumbu49
Tabel 14 Tabel Perbandingan Capaian Nilai AKIP Kecamatan Rawalumbu pada Tahun Sebelumnya50
Tabel 15 Tabel Perbandingan Capaian Nilai AKIP Kecamatan Rawalumbu dengan Kecamatan di Kota Bekasi51
Tabel 16 Indikator Capaian Komponen Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Capaian Nilai AKIP di Kecamatan Rawalumbu52
Tabel 17 Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Nilai AKIP di Kecamatan Rawalumbu Target Renstra 2024-202653



Tabel 18 Alokası dan Realisası Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama Capaian Nilai AKIP di Kecamatan Rawalumbu54
Tabel 19 Kertas Kerja Hasil Penilaian Zona Tertib58
Tabel 20 Zona Tertib Yang Telah Berkategori Baik58
Tabel 21 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib di Kecamatan Rawalumbu59
Tabel 22 Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib di Kecamatan Rawalumbu60
Tabel 23 Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib di Kecamatan Rawalumbu Target Renstra 2024 202660
Tabel 24 Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib di Kecamatan Rawalumbu62
Tabel 25 Pagu Anggaran Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Per Program Tahun 202464
Tabel 26 Realisasi Anggaran Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Per Program



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama Tahun Anggaran 2024.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Kinerja (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Rawalubu berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026, Rencana Kinerja Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2024.

Berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 berjalan sesuai dengan Output dan Outcome sudah dicapai dan tidak mengalami permasalahan dan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program kerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategis instansi pemerintah yang mengidikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Rawalumbu atas penyelenggaraan program kegatan pada tahun 2024 yang sekaligus menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.



Laporan Kinerja ini disusun dengan menyajikan hasil Pengukuran Kinerja yang merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Rawalumbu yang dilaksanakan tahun 2024. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan, Kecamatan adalah unsure perangkat daerah yang berbeda dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Wali Kota dalam menyelenggaraan kewenangan di bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan Pemerintah serta mengevaluasi pelaksanaannya. Sesuai Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan Rawalumbu dan Kelurahan Kota Bekasi, Kecamatan Rawalumbu sebagai salah satu unit kerja terdepan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, maka berdasarkan Keputusan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan Kota Bekasi, Kecamatan berkedudukan dibawah dan bertanggugjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Sementara apabila dibandingkan dengan target perencanaan jangka menengah, maka terlihat bahwa pada tahun 2024 ini hampir keseluruhan target yang telah ditetapkan telah tercapai. Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Rawalumbu Tahun 2024-2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 terpenuhi sesuai dengan harapan.



Memperhatikan perbandingan capaian kinerja antara target indikator yang realisasi Kinerja Kecamatan Rawalumbu nampak seluruh indikator yang direncanakan berhasil dicapai dengan optimal sesuai target. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan pembinaan dan komitmen kuat dari seluruh pihak mulai dari Camat, Sekretaris Camat beserta para Kasi dan kasubag dan seluruh pelaksana di lingkungan Kecamatan Rawalumbu dalam melaksanakan program kegiatan sesuai dengan prinsip efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Pemerintah Kota Bekasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026, Rencana Kinerja Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2024.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan Rawalumbu dan Kelurahan Kota Bekasi, Kecamatan Rawalumbu sebagai salah satu unit kerja terdepan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Percepatan pembangunan dan perkembangan wilayah menimbulkan pengaruh yang cukup besar, baik secara fisik maupun non fisik di wilayah Kecamatan Rawalumbu, hal ini terlihat pada beberapa faktor yang menentukan, diantaranya yaitu:

- Tingkat pertumbuhan pemukiman baru yang tinggi di wilayah Kecamatan menimbulkan pertambahan penduduk dan berkembangnya berbagai permasalahan kependudukan;
- Tingkat pertumbuhan fasilitas umum seperti telepon, prasarana perhubungan, listrik dan perbelanjaan semakin meningkat;
- 3. Tingkat kebutuhan prasarana sosial seperti prasarana peribadatan, pendidikan dan kesehatan meningkat;
- 4. Karakteristik dan dinamika kehidupan masyarakat menjadi heterogen karena memiliki keterpaduan antara kehidupan pedesaan dan perkotaan.

Untuk mendukung pencapaian kinerja Kecamatan Rawalumbu menjadi bagian dalam penyusunan LKIP ini analisa keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Rawalumbu yang telah ditetapkan pada tahun 2024 yang berkeselarasan dengan Sasaran Strategis yaitu :

- 1. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rawalumbu yang pertama adalah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi 2024-2026 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah terutama dalam menunjang pencapaian indikator Tujuan Kecamatan Rawalumbu yaitu Capaian Nilai Zona Integritas (ZI).
- 2. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rawalumbu yang kedua adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi 2024-2026 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah terutama dalam menunjang pencapaian indikator Tujuan Kecamatan Rawalumbu yaitu Capaian Nilai Zona Integritas (ZI).

3. Indikaktor kinerja utama Kecamatan Rawalumbu yang ketiga adalah Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib di Kecamatan Rawalumbu. Indikator ini digunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran Renstra Kecamatan Rawalumbu yaitu Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat di Kecamatan Rawalumbu. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi 2024-2026 yaitu Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman terutama dalam menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran persentase penurunan jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban umum.

Jika melihat capaian indikator kinerja utama kecamatan rawalumbu pada tahun 2024 dimana indikator Nilai AKIP di Kecamatan Rawalumbu memperoleh capaian kinerja sebesar 77,90, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik memperoleh capaian kinerja sebesar 83,20, dan indikator Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib di Kecamatan Rawalumbu mencapai 20%, Kecamatan Rawalumbu harus bisa lebih meningkatkan kinerja yang sudah tercapai pada tahun 2024 maupun terhadap peningkatan target yang telah ditetapkan pada Renstra pada tahun 2024. Adapun rincian kinerja yang harus ditingkatkan pada tahun ini adalah sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik sebesar 84,50 memperoleh capaian kinerja sebesar 98,46%, capaian kinerja ini diperoleh dari Nilai rata-rata IKM dari Semester 1 dan Semester 2 sebesar 83,20 dibandingkan target yang telah ditetapkan sebesar 84,50. Maka tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Rawalumbu harus memastikan pada tahun 2025 harus melampaui indeks di tahun 2024 dengan minimal Indeks Kepuasan Masyarakat dapat mencapai 85 atau bahkan dapat melebihi dari target

yang sudah ditetapkan. Adapun upaya yang akan dilakukan oleh kecamatan rawalumbu pada tahun 2024 adalah dengan pelatihan front office, pengadaan aplikasi E- Open untuk mempermudah pelayanan pelayanan dari rumah, serta melakukan rehabilitasi loket pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan untuk menunjang sarana dan prasarana yang menjadi penilaian dengan nilai lebih kecil.

- Untuk Nilai AKIP di Kecamatan Rawalumbu pada tahun 2024 mendapatkan nilai sebesar 77,90 dengan persentase capaian 103,32%, pada tahun 2024 capaian nilai AKIP dapat memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 75,4.
- 3. Untuk Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib sebesar 20%, capaian kinerja ini diperoleh dari realisasi sebesar 20% dari target capaian sebesar 20%. Maka tantangan yang harus dihadapi oleh kecamatan rawalumbu adalah memastikan pada tahun 2025 harus dapat melampaui persentase ditahun 2024 dengan target yang harus dicapai sebesar 25%. Adapun upaya yang akan dilakukan oleh Kecamatan Rawalumbu untuk mencapai target yang sudah ditetapkan adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap titik lokasi K3 yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk melakukan pembahasan lebih lanjut secara komperhensif mengenai kinerja Kecamatan Rawalumbu pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat, akan kami bahas pada BAB III (AKUNTABLITAS KINERJA) pada laporan kinerja kecamatan rawalumbu tahun 2024 ini.

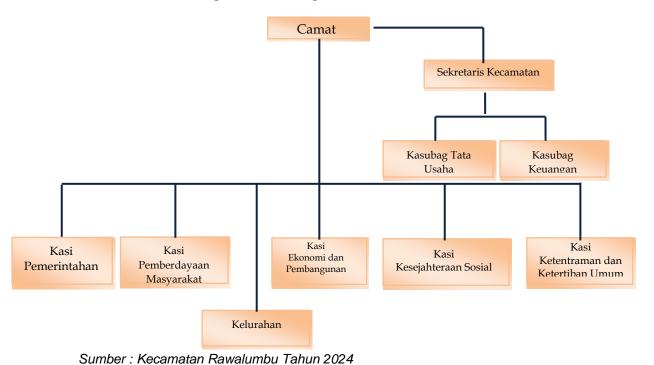
1.2 Tugas Fungsi dan Wewenang Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan, Kecamatan adalah unsur perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Wali Kota

dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi pelaksanaannya.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, maka berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan Kota Bekasi, Kecamatan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Camat dibantu oleh Sekretaris Kecamatan yang mengelola Perencanaan, Kepegawaian Umum dan Keuangan serta didukung oleh 5 (lima) Seksi, berikut Susunan Organisasi Kecamatan Rawalumbu terdiri dari:

- 1. Pimpinan adalah Camat;
- 2. Pembantu pimpinan adalah Sekretariat Kecamatan dan Sub Bagian;
- 3. Pelaksana adalah Seksi dan kelompok jabatan fungsional



Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Rawalumbu

1. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang Pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Seksi Kesejahteraan Sosial

Menangani mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Kesejahteraan Sosial.

4. Seksi Ekonomi Pembangunan

Menangani mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Ekonomi dan Pembangunan.

5. Seksi Keamanan dan Ketertiban

Menangani mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Keamanan Ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku.

1.3 Aspek Straregis Organisasi

Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari: tingkat mikro individu atau pribadi rakyat, tingkat agregat nasional dimulai dari tingkat kelompok masyarakat, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten- kota, provinsi sampai nasional dan tingkat global-internasional pembangunan antar negara dan bangsa.

Kota Bekasi sebagai kota metropolitan yang memiliki masyarakat heterogen dari berbagai macam suku, bangsa di Indonesia membutuhkan suatu pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Kecamatan Rawalumbu berperan dalam mewujudkan hal tersebut.

Dimana masyarakat berperan aktif dalam setiap kegiatan pembangunan. Mulai dari dibentuknya organisasi kemasyarakatan sampai keterlibatan dalam hal pelaksanaan dan pelaporan. Kecamatan Rawalumbu bertugas untuk mendukung dan meningkatkan peran serta masyarakat sebagai salah satu indikator kinerja.

Pelimpahan sebagian wewenang Wali Kota kepada Camat meliputi aspek pembangunan di tingkat Kecamatan. Pembangunan tidak akan sampai dampaknya ke lapisan masyarakat tanpa memperhatikan aspek ketertiban, keindahan dan kenyamanan (K3). Dalam mendukung pencapaian tersebut, Kecamatan Rawalumbu berfungsi mewujudkan zona-zona K3 sehingga pembangunan di Kecamatan Rawalumbu dapat dirasakan.

Penyederhanaan alur birokrasi terutama dalam birokrasi pelayanan publik menjadi hal yang sangat penting. Secara geografis, kecamatan (termasuk kelurahan didalamnya) dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari penyederhanaan tersebut. Lokasi yang dekat dengan masyarakat berguna bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

1.4 Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Rawalumbu pada tahun 2024 terdiri dari:

- I. Belanja Langsung Urusan (BLU)
- a) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program ini direalisasikan melalui kegiatan dan sub kegiatan :

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kecamatan Rawalumbu;
- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau

- Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Bojong Rawalumbu;
- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Pengasinan;
- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Bojong Menteng;
- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Sepanjangjaya;

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan.

b) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini direalisasikan melalui kegiatan dan sub kegiatan:

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bojong Rawalumbu;
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengasinan;
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bojong Menteng;
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sepanjangjaya;
- Pembangunan Saranan dan Prasarana Kelurahan Bojong Rawalumbu;
- Pembangunan Saranan dan Prasarana Kelurahan

Pengasinan;

- Pembangunan Saranan dan Prasarana Kelurahan Sepanjangjaya;
- Pembangunan Saranan dan Prasarana Kelurahan Bojong Menteng;
- Evaluasi Kelurahan.

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bojong Rawalumbu;
- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Pengasinan;
- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bojong Menteng;
- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sepanjangjaya.

c) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini direalisasikan melalui kegiatan dan sub kegiatan :

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
 Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
- Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Rawalumbu;
- Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Bojong Rawalumbu;
- Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Pengasinan;
- Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Sepanjangjaya;

- Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Bojong Menteng;
- II. Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini direalisasikan melalui kegiatan dan sub kegiatan :

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
 Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
 Lapangan;
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya, Kecamatan Rawalumbu berkewajiban melayani seluruh masyarakat agar dapat memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jenis pelayanan di Kecamatan Rawalumbu terbagi ke dalam pelayanan dengan produk yang merupakan hasil dari Kecamatan Rawalumbu dan produk dimana Kecamatan Rawalumbu berperan dalam hal fasilitasi pelayanan.

Produk layanan yang merupakan hasil dari Kecamatan Rawalumbu adalah produk pelayanan yang berasal dari 5 seksi yang ada di Kecamatan Rawalumbu diantaranya:

- Surat Keterangan Kesanggupan;
- Surat Keterangan Waris;
- Rekomendasi Nikah Non Muslim;
- 4. Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Untuk Haji;
- 5. Surat Keterangan Domisili Yayasan;
- 6. Surat Keterangan Belum Menikah dan;
- 7. Surat Keterangan Tidak Mampu.

Sedangkan dalam mendukung pelayanan yang ada di dinas teknis

terkait guna memangkas alur birokrasi yang rumit. Kecamatan Rawalumbu bertugas memfasilitasi pelayanan kependudukan yang menjadi produk layanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil seperti : Pengantar Surat Pindah, Pencetakan Kart Identitas Anak (KIA), Perekaman dan Pencetakan e-KTP dan Akte Kelahiran.

Kecamatan Rawalumbu berkomitmen menyelenggarakan pelayanan publik dengan standar pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kecamatan Rawalumbu dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi untuk menjadi kota yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera dan ihsan.

1.5 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKIP Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi
 Sub Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi
 secara umum

B. Analisis Capaian KinerjaBab ini menyajikan analisis capaian kinerja utama;analisis dan evaluasi capaian kinerja yang

menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun keggalan pencapaian kinerja.

C. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja pada Kecamatan Rawalumbu didasarkan atas Rencana Strategis Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Camat Rawalumbu Kota Bekasi dimana pada Perjanjian tersebut terdiri atas 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja yang digunakan menyesuaikan dengan program/kegiatan tahun 2024, dengan target satuan berupa % (persen), unit, jumlah, sesuai dengan target yang ingin dicapai dari program/kegiatan.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam Renstra Tahun 2024-2026 Kecamatan Rawalumbu terdapat tujuan dan sasaran Kecamatan Rawalumbu beserta indikator. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran Kecamatan Rawalumbu yaitu:



Tabel 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		FORMULASI		KINERJA TU N PADA TAH	
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan		1	Capaian Nilai Zona Integritas (ZI)	Nilai Pengungkit = Manajemen Perubahan +Penataan Tatalaksana +Penataan sistem manajemen +Penguatan akuntabilitas kinerja+Penguatan Pengawasan +Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	37,35	37,65	37,85
	Rawalumbu	1.1 Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	1.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat / Survei Pelayanan Publik melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden.	84,5	85	85,3
		1.2 Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	1.2.1	Nilai Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai AKIP = Laporan Hasil Laporan Evaluasi SAKIP	75,4	75,5	76
2	Terwujudnya Kecamatan Rawalumbu yang Tertib dan Aman		1	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum	((Jumlah Zonasi yang belum tertib Tahun N-1)-(Jumlah Zonasi yang belum tertib Tahun N)/Jumlah Zona belum tertib) x 100%	20%	25%	33%
		1.1 Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	1.1.1	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	Jumlah zonasi yang telah ditertibkan / Jumlah zona tertib x 100%	20%	25%	33%



2.1.2 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

mengukur peningkatan kinerja di Kecamatan Rawalumbu digunakan Indikator Tujuan dan Sasaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Keterangan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Sedangkan untuk mengukur peningkatan layanan kepada masyarakat digunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas dan penyediaan pelayanan publik untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang pelayanan publik.

Berdasarkan Perda Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan bahwa zona tertib, bersih dan indah perlu ditingkatkan untuk mewujudkan masyarakat berkeadilan dan menciptakan lingkungan perkotaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.



Tabel 2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rawalumbu Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	ALASAN	PENJELASAN / RUMUS	SATUAN	TARGET TAHUN 2024																
1	3 Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	Masyarakat terhadap tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga dalam penyalahgunaan wewenang di		Masyarakat terhadap tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga dalam penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mengetahui kinerja unit pelayanan perlu diukur melalui		Masyarakat terhadap Layanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga dalam penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mengetahui kinerja unit pelayanan perlu diukur melalui		Masyarakat terhadap Layanan Publik bahwa perlu upaya u meningkatkan kualitas dan menjamin penyed pelayanan publik untuk memberikan perlindungan setiap warga dalam penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik. U mengetahui kinerja unit pelayanan perlu diukur me		Masyarakat terhadap tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga dalam penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mengetahui kinerja unit pelayanan perlu diukur melalui		Masyarakat terhadap Layanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga dalam penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mengetahui kinerja unit pelayanan perlu diukur melalui		Masyarakat terhadap tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga dalam penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mengetahui kinerja unit pelayanan perlu diukur melalui		Masyarakat terhadap Layanan Publik meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga dalam penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mengetahui kinerja unit pelayanan perlu diukur melalui		Masyarakat terhadap tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga dalam penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mengetahui kinerja unit pelayanan perlu diukur melalui		IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden. Penerima layanan Kecamatan Rawalumbu	6 Nilai	84,5
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	Nilai Akuntabliitas Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Remerintah (AKIP) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktifita, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.			Nilai	75,4																
3	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan bahwa untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dibutuhkan keseimbangan dan keselarasan antara ketertiban, kebersihan dan keindahan.	Jumlah zonasi yang telah ditertibkan / Jumlah zona tertib x 100%	Persen	20%																



2.2 Perjanjian Kinerja

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja komitmen dasarnya adalah pernyataan pimpinan mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan dalam waktu tahun terukur rentang satu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah selain itu dapat pula digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Rawalumbu Tahun 2024 merupakan target kinerja tahun kedua dari Perubahan Renstra Kecamatan Rawalumbu 2024-2026, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas fungsi Kecamatan Rawalumbu. Selanjutnya target kinerja tersebut dijabarkan dalam target per triwulan sebagai bahan evaluasi per triwulan. Berikut adalah sasaran kinerja, indikator dan target yang akan dicapai dalam Perjanjian Kinerja (Tabel 2.2.1) beserta Alokasi Anggaran pertriwulan (Tabel 2.2.2):



Tabel 3 Perjanjian Kinerja Kecamatan Rawalumbu Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	84,5
2.	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	Nilai Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	75,4
3.	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	20%

Tabel 4 Alokasi Anggaran Per Triwulan

No	Nama Brawam / Karista	Pagu	Alokasi Triwulan				IV4
No	Nama Program / Kegiatan	Anggaran	- I	II .	III	IV	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.432.764.440	5.185.892.879	6.171.944.853	4.746.427.854	5.328.498.854	
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.596.996.000	2.388.042.019	2.914.829.993	2.383.667.994	2.910.455.994	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	-	1.500.000	-	1.500.000	
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	10.000.000	-	-	-	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	20.000.000	-	20.000.000	-	-	
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	251.000.000	214.701.000	36.299.000	-	-	
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000	5.000.000	7.500.000	7.500.000	10.000.000	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	4.800.000	5.200.000	4.800.000	5.200.000	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178.973.000	37.408.000	67.004.000	37.008.000	37.553.000	
10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000	-	10.000.000	-	-	
11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	412.836.000	210.990.000	155.510.000	-	46.336.000	
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.000.000	64.000.000	158.500.000	63.500.000	64.000.000	

No	Nama Program / Kegiatan	Pagu	Alokasi Triwulan				
NO	Nama Program / Regiatan	Anggaran	T I	II .	III	IV	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.091.959.440	2.189.202.360	2.524.352.360	2.189.202.360	2.189.202.360	
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.000.000	22.500.000	25.000.000	22.500.000	25.000.000	
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	135.000.000	31.999.500	38.999.500	31.999.500	32.001.500	
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	-	200.000.000	-	1	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100.768.000	8.803.600	36.887.000	51.660.200	3.417.200	
18	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kecamatan Rawalumbu	15.000.000	5.182.600	3.270.600	3.270.600	3.276.200	
19	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Bojong Rawalumbu	15.000.000	-	10.107.400	4.892.600	-	

No	Nome Breaven / Vesisten	Pagu	Alokasi Triwulan				
NO	Nama Program / Kegiatan	Anggaran	1	II .	Ш	IV	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Pengasinan	15.000.000	-	5.964.000	8.946.000	90.000	
21	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Sepanjangjaya	26.342.000	-	4.686.000	21.656.000	-	
22	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Bojong Menteng	25.000.000	3.621.000	10.863.000	10.465.000	51.000	
23	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4.426.000	-	1.996.000	2.430.000	-	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	9.442.086.400	1.995.687.000	3.535.320.000	2.114.848.000	1.796.231.400	
24	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100.000.000	96.100.000	-	-	3.900.000	
25	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	210.150.000	27.569.000	19.299.000	156.808.000	6.474.000	
26	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bojong Rawalumbu	3.324.772.000	783.940.400	974.306.400	793.946.400	772.578.800	
27	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pengasinan	2.327.849.600	555.628.400	714.721.400	533.448.400	524.051.400	

No	Nome Program / Variator	Pagu	Alokasi Triwulan				No.
No	Nama Program / Kegiatan	Anggaran	I I	II.	III	IV	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sepanjangjaya	1.153.238.800	236.841.200	347.388.200	327.360.200	241.649.200	
29	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bojong Menteng	1.074.076.000	181.768.000	417.765.000	237.765.000	236.778.000	
30	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bojong Rawalumbu	200.000.000	1	200.000.000	1	-	
31	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengasinan	200.000.000	1	200.000.000	1	-	
32	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sepanjangjaya	200.000.000	-	200.000.000	-	-	
33	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bojong Menteng	200.000.000	-	200.000.000	-	-	
34	Evaluasi Kinerja	30.000.000	30.000.000	-	-	-	
35	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	280.000.000	21.840.000	221.840.000	25.520.000	10.800.000	
36	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bojong Rawalumbu	40.000.000	20.000.000	20.000.000	-	-	
37	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pengasinan	22.000.000	2.000.000	-	20.000.000	-	
38	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sepanjangjaya	40.000.000	20.000.000	-	20.000.000	-	
39	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bojong Menteng	40.000.000	20.000.000	20.000.000	-	-	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	20.000.000	5.822.000	8.107.500	6.070.500	-	

No	Nama Program / Kagistan	Pagu	Alokasi Triwulan				Ket
NO	Nama Program / Kegiatan	Anggaran	1	II.	Ш	IV	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
40	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	20.000.000	5.822.000	8.107.500	6.070.500	-	
	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1.208.600.000	290.253.000	301.097.000	294.937.000	322.313.000	
41	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	80.000.000	12.354.000	12.624.000	12.668.000	42.354.000	
42	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	63.000.000	15.750.000	15.750.000	15.750.000	15.750.000	
43	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Bojong Rawalumbu	380.000.000	92.490.000	96.390.000	96.860.000	94.260.000	
44	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Pengasinan	280.000.000	69.985.000	69.985.000	69.985.000	70.045.000	
45	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Sepanjangjaya	162.000.000	40.500.000	40.500.000	40.500.000	40.500.000	
46	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Bojong Menteng	243.600.000	59.174.000	65.848.000	59.174.000	59.404.000	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Rawalumbu tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja (PK) Kecamatan Rawalumbu, yang tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *Actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksaaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya, pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program dan sasaran yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Rawalumbu yang dilaksanakan Tahun 2024. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja, Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja yang telah dicapai Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi selama tahun 2024, berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi tahun 2024-2026 serta perjanjian kinerja

Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi tahun 2024 sebayak 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja yang semua indikatornya mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian setiap sasaran strategis beserta dengan indikator kinerjanya dan analisis serta perbandingan dari setiap capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 5 Capaian Kinerja Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Nilai	84,5	83,20	98,46%
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	Nilai Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	75,4	77,9	103,32%
3	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	persen	20	20	100,00%

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Rawalumbu, 2024

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 berdasarkan Renstra Kecamatan Rawalumbu Tahun 2024-2026 dimana telah ditetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk mencapai sasaran startegis yaitu :

- Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah, diukur melalui indikator yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik dengan capaian kinerja sebesar 98,46 persen;
- 2. Nilai Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan

capaian kinerja sebesar 103,32 persen.

3. Terwujudnya Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat Yang Didukung Oleh Kohesi Sosial Yang Kuat, dengan indikator kinerja yaitu Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib capaian kinerja 100 persen (tercapai) dapat dinterpretasikan sasaran Kecamatan Rawalumbu pada indikator ini tercapai.

Dengan melihat 3 (tiga) indikator untuk mengukur 3 (tiga) sasaran strategis dimana seluruh indikator tercapai/terlampaui maka capaian indikator kinerja tersebut semestinya mendukung kepada ketercapaian indikator tujuan Kecamatan Rawalumbu dalam Meningkatnya Akuntabilitas, Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Rawalumbu.

3.2. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah

3.2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka perlu melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu cara pengukuran kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat.

Melalui survei ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi- inovasi pelayanan publik.

Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi berpedoman Penyusunan pada Peraturan Menteri Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dimana Untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik baik yang bersifat barang, jasa maupun administratif digunakan 9 (Sembilan) unsur penting yaitu Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana dan Prasarana dan Penanganan pengaduan saran dan Masukan yang diukur terhadap 4 (empat) jenis layanan pada Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi.

Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik

			Tahu	n 2024	Capaian	
No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja Tahun 2024 (%)	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Nilai	84,5	83,20	98,46	

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target IKM Kecamatan Rawalumbu pada tahun 2024 sebesar 84,5, sementara realisasi mencapai 83,20, maka capaian kinerja tahun

2024 atas indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik yang sebesar 98,46 persen, maka capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik pada Tahun 2024 tidak dapat mencapai target.

Dalam mengukur kinerja pelayanan publik di Kota Bekasi, digunakan indikator Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM baik. Pada Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Rawalumbu Tahun 2024 terhadap 5 jenis layanan publik di lingkungan Kecamatan Rawalumbu. Untuk melihat **Nilai Rata-Rata** pada hasil survey kepuasan masyarakat Tahun 2024 berdasarkan Nilai Unsur Pelayanan pada Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi yang dihitung dengan formulasi.

Nilai IKM Semester 1 + Nilai IKM Semester 2 = Nilai Rata-Rata

Nilai Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7 Hasil Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester 1 pada Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi

		Nilai Unsur Pelayanan							
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Nilai Rata- Rata (NRR)	3.144	3,150	3,099	4,000	3,142	3,169	3,220	3,110	3,082
IKM per unsur/ NRR	78.59	78.75	77.48	100	78.54	79.23	80.50	77.75	77.06
Kategori	В	В	В	Α	В	В	В	В	В
IKM Unit Layanan	80,88 (B atau Baik)								

Sumber: Hasil Survey IKM Semester I Kecamatan Rawalumbu Tahun 2024



Tabel 8 Hasil Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester 2 pada Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi

		Nilai Unsur Pelayanan							
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Nilai Rata- Rata (NRR)	3,222	3,256	3,178	4,000	3,178	3,356	3,378	3,200	3,067
IKM Per Unsur (NRR x 25)	80.55	81.4	79.45	100	79.45	83.9	84.45	80	76.68
Kategori	В	В	В	А	В	В	В	В	В
IKM Unit Layanan		85.52 (Baik)							

Sumber: Hasil Survey IKM Triwulan III Kecamatan Rawalumbu Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengolahan data nilai rata-rata IKM Unit Layanan pada Semester 1 dan Semester 2, dapat disimpulkan bahwa hasil IKM pada Tahun 2024 sebagai berikut:

 Penilaian Semester 1 dan 2 Tahun 2024 diperoleh Nilai IKM Semester 1 sebesar 80,88 dan Semester 2 Tahun 2024 dengan nilai sebesar 85,52 dengan kategori B (Baik), sehingga total nilai rata-rata IKM yang diperoleh Kecamatan Rawalumbu pada Tahun 2024 sebesar 83,20 dari perhitungan dengan rumus :

$$\frac{80,88 + 85,52}{2} = 83,20$$

2. Dua unsur yang memiliki nilai terendah pada semester 1 dan semester 2 yaitu Waktu Penyelesaian (U3) mendapat nilai 3.099 pada semester 1 dan 3.178 pada semester 2 dimana kelemahan yang menjadi persoalantidak semua pengguna layanan mendapatkan pemberitahuan tentang pengurusan dokumen pelayanan yang diajukan dan direkomendasikan dengan perbaikan. Selanjutnya Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U9) mendapat nilai 3.082 pada semester 1

dan 3.067 pada semester 2 dikarenakan terkendala dengan aduan pada media sosial yang agak terlambat ditindak lanjuti.

Adapun faktor tingginya beberapa indikator pada Survey Kepuasan Masyarakat di Tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- Pelayanan prima yang diberikan oleh petugas pelayanan kepada masyarakat turut menjadi salah satu faktor yang meningkatkan nilai IKM pada tahun ini sehingga masyarakat merasa terlayani dengan baik;
- Sarana dan Prasarana yang kurang memadai untuk masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, akan tetapi pada Tahun 2025 akan dilakukan perbaikan ruang pelayanan dan ruang tunggu agar masyarakat semakin nyaman dalam mendapatkan pelayanan di Kecamatan Rawalumbu.

Adapun yang menjadi faktor permasalahan pada pelayanan sehingga tidak tercapainya Target IKM di tahun 2024 antara lain :

- Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Layanan registrasi online sebenarnya sudah mulai dilakukan namun belum banyak masyarakat yang melakukan registrasi secara online dan langsung datang ke lokasi layanan;
- Sarana dan Prasarana yang kurang memadai untuk masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, akan tetapi pada Tahun 2024 akan dilakukan perbaikan ruang pelayanan dan ruang tunggu agar masyarakat semakin nyaman dalam mendapatkan pelayanan di Kecamatan Rawalumbu;
- 3. Petugas layanan sudah pernah diberikan pelatihan khusus terkait service excellent tetapi belum maksimal

dalam melayani warga serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi.

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik pada Kecamatan Rawalumbu, tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9 Indikator Capaian Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik

No	Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	capaian kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	Nilai	83,5	85,39	102,26%	84	84,06	100,07%	84,5	83,20	98,46

Sumber: Hasil Survey IKM Kecamatan Rawalumbu Tahun 2024

Dengan melihat indikator kegiatan pada tahun 2024 maka tidak dapat melebihi target, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di Kecamatan Rawalumbu di tahun 2024 dengan Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2024 yang dapat terlihat dari Indikator Kegiatan Capaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Masyarakat dimana pada tahun 2023 telah melampaui target akan tetapi pada tahun 2024 ini tidak dapat melampaui target, masih terdapat kendala yang dihadapi oleh Kecamatan Rawalumbu dalam mencapai target Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu Sarana dan Prasarana, Waktu Penyelesaian dan Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan di Kecamatan Rawalumbu yang masih harus ditingkatkan agar

memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

Maka dari itu pada tahun 2025 ini perbaikan Sarana dan Prasarana pelayanan di Kecamatan Rawalumbu menjadi kegiatan yang harus dilaksanakan dan diusulkan didalam Musrenbang pada Tahun Anggaran selanjutnya, pada point Waktu Penyelesaian rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi yang massif kepada masyarakat perihal registrasi online yang dapat memangkas waktu pelayanan serta respons cepat setiap pelayanan yang masuk dan khusus untuk pelayanan waris ada penambahan waktu yang akan diinfokan oleh petugas kepada penerima layanan jika telah selesai dikarenakan perlunya ketelitian dalam memeriksa keabsahan dokumen dan pada point Sistem, *Mekanisme dan Prosedur* untuk mensosialisasikan perubahan system, mekanisme dan prosedur pelayanan public melalui media social, website, banner dan menyampaikan secara langsung kepada masyarakat agar dapat meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2025 serta pada point Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap media sosial agar segala aduan, saran dan masukan langsung dapat ditindak lanjuti.

Dengan melihat capaian indikator kegiatan diatas, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik.

Capaian indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 jika dikaitkan dengan target Renstra 2024-2026 pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10 Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di Kecamatan Rawalumbu Target Renstra 2024-2026

Capaian Indikator	Satuan	Nilai IKM		
Kinerja Sasaran	Satuan	2024	2026	
Target	Persen	84,5	85,3	
Realisasi	Persen	83,20	-	

Sumber: Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Rawalumbu Tahun 2024

Jika melihat tabel diatas, realisasi indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik pada tahun 2024 sebesar 83,20 dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2026 sebesar 85,3, maka Kecamatan Rawalumbu harus dapat meningkatkan capaian kinerjanya ke depan. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari Kecamatan Rawalumbu untuk meningkatkan capaian kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, diantaranya:

- a. Melakukan evaluasi pada masing-masing seksi dan kelurahan terkait tupoksi yang berkaitan dengan pelayanan publik;
- b. Melakukan perbaikan sarana prasarana penunjang pelayanan agar masyarakat lebih nyaman dalam mendapatkan pelayanan;
- Melakukan reviu terhadap SOP Pelayanan Publik dan dilakukan revisi jika diperlukan;
- d. Melakukan pembinaan terhadap aparatur pelayanan tentang perubahan mindset (pola pikir) dari petugas pelayanan yang dilayani menjadi petugas yang melayani pengguna jasa (masyarakat) serta meningkatkan kapabilitas petugas Front Office melalui kegiatan Pendidikan Formal dan Non Formal.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Kecamatan Rawalumbu Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11 Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Untuk Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di Kecamatan Rawalumbu

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rp	Realisasi Ang	garan	Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
	Kegiatan		Rp.	(%)	(%)	LIISICIISI
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100.768.000,00	91.558.000,00	90,86%	100%	9,14%
Publik	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	96.342.000,00	87.520.500,00	90,84%	100%	9,16%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	15.000.000,00	14.549.000,00	96,99%	100%	3,01%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Bojong Rawalumbu	15.000.000,00	14.280.000,00	95,20%	100%	4,80%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Pengasinan	15.000.000,00	13.894.000,00	92,63%	100%	7,37%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Sepanjangjaya	26.342.000,00	20.865.500,00	79,21%	100%	20,79%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Bojong Menteng	25.000.000,00	23.932.000,00	95,73%	100%	4,27%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.426.000,00	4.037.500,00	91,22%	100%	8,78%

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rp	Realisasi Ang	garan	Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4.426.000,00	4.037.500,00	91,22%	100%	8,78%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	9.436.183.400,00	9.388.107.900,00	99,49%	100%	0,51%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	9.241.183.400,00	9.193.220.400,00	99,48%	100%	0,52%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100.000.000,00	97.595.800,00	97,60%	100%	2,40%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Bojong Rawalumbu	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00%	100%	0,00%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Pengasinan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00%	100%	0,00%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Sepanjangjaya	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00%	100%	0,00%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Bojong Menteng	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00%	100%	0,00%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	210.150.000,00	203.767.250,00	96,96%	100%	3,04%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengasinan	2.357.849.600,00	2.345.274.600,00	99,47%	100%	0,53%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bojong Rawalumbu	3.354.772.000,00	3.335.595.600,00	99,43%	100%	0,57%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sepanjangjaya	1.183.238.800,00	1.181.124.800,00	99,82%	100%	0,18%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bojong Menteng	1.205.173.000,00	1.200.707.600,00	99,63%	100%	0,37%
	Evaluasi Kelurahan	30.000.000,00	29.154.750,00	97,18%	100%	2,82%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	195.000.000,00	194.887.500,00	99,94%	100%	0,06%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bojong Rawalumbu	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%	100%	0,00%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pengasinan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%	100%	0,00%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sepanjangjaya	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%	100%	0,00%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bojong Menteng	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%	100%	0,00%
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	35.000.000,00	34.887.500,00	99,68%	100%	0,32%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	20.000.000,00	17.205.000,00	86,03%	100%	13,98%

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rp	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	20.000.000,00	17.205.000,00	86,03%	100%	13,98%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	20.000.000,00	17.205.000,00	86,03%	100%	13,98%

Sumber : Aplikasi siencang.bekasikota.go.id Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 3 program, 5 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik, dengan anggaran sebesar Rp. 9.556.951.400 (sembilan milyar lima ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah) tingkat realisasi anggaran sebesar Rp. 9.556.951.400 dengan 99,37%, sebesar terbagi Program persentase yang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 100.768.000 (seratus juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tingkat realisasi anggaran sebesar Rp. 91.558.000 dengan persentase sebesar 90,86%. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp. 9.436.183.400 (Sembilan milyar empat ratus tiga puluh enam ribu serratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) tingkat realisasi anggaran sebesar Rp. 9.388.107.900 dengan persentase sebesar 99,48% Dan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sebesar Rp. Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tingkat realisasi anggaran sebesar Rp. 17.205.000 dengan persentase sebesar 86,03%.

Jika dikaitkan dengan realisasi IKM sebesar 83,20 dari target nilai sebesar 84,5 atau dengan capaian kinerja hanya sebesar 98,46 persen, pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum ditahun 2024 tidak dilakukan refocusing

anggaran dikarenakan demi menunjang sarana dan prasarana untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat. Akan tetapi terdapat Efisiensi Anggaran yang mencapai 9,14% pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, 0,51% pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan serta 13,98% pada Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yang dimana pada 3 program tersebut masyarakat dalam keterlibatan setiap kegiatan yang dilaksanakan cukup signifikan sehingga anggaran yang dialokasikan tidak terserap 100%.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik merupakan indikator yang banyak digunakan oleh kecamatan baik di Kota Bekasi maupun di luar Kota Bekasi. Karena adanya standar perhitungan nasional menyebabkan indikator ini dapat dibandingkan antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya. Adapun perbandingan IKM antara Kecamatan Rawalumbu dengan kecamatan di Kota Bekasi yang berbatasan serta dengan kecamatan lain di luar Kota Bekasi yaitu

Tabel 12 Perbandingan Realiasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di Kecamatan Rawalumbu dengan Kecamatan lain

No	Kecamatan	Satuan	Realisasi Kinerja
1	Rawalumbu	Nilai	83,20
2	Pondok Gede	Nilai	85,53
3	Bekasi Selatan	Nilai	82,10
4	Pondok Melati	Nilai	84,94
5	Medan Satria	Nilai	83,20

Sumber: Survey IKM Kecamatan Pondok Gede, Bekasi Selatan, Pondok Melati dan Medan Satria Tahun 2024, diolah

Berdasarkan hasil IKM pada 4 (empat) Kecamatan yang

dilakukan perbandingan, maka dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan, karena semua Kecamatan masuk kedalam kategori "baik".

3.2.2 Indikator Sasaran Nilai Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Nilai AKIP diukur dari Pengukuran Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja yang menjabarkan Pengukuran Kinerja Tahunan dengan membuat pengukuran kinerja pertriwulan yang mencerminkan pencapaian kinerja, Pengelolaan Data Kinerja berupa data pencapaian target kinerja dan realiasi penggunaan anggaran di Kecamatan Rawalumbu, Pelaporan Kinerja yang menjadi dasar penilaian AKIP setelah melalui reviu serta Evaluasi oleh Bagian Organisasi dan Inspektorat Kota Bekasi.

Adapun Capaian kinerja indikator Nilai AKIP di Kecamatan Rawalumbu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Nilai AKIP di Kecamatan Rawalumbu

	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahui	า 2024	Capaian
No			Target	Realisasi	Kinerja Tahun 2024
1	Nilai Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	75,4	77,9	103,32%

Sumber: Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Rawalumbu, 2024

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2024 sebesar 75,5, sementara realisasi mencapai 77,9 maka capaian kinerja tahun 2024 atas Indikator Sasaran Nilai AKIP Kecamatan Rawalumbu pada tahun 2024 sebesar 103,32 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2024 dapat melampaui target. Untuk melihat perbandingan capaian Nilai AKIP pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 berikut kami sajikan tabel perbandingan hasil Nilai AKIP Kecamatan Rawalumbu dengan Nilai AKIP pada tahun sebelumnya yang ada dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14 Tabel Perbandingan Capaian Nilai AKIP Kecamatan Rawalumbu pada Tahun Sebelumnya

	Indikator		Tahur	2023	Tahun 2024		
No	Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Nilai Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	76	75,95	75,4	77,9	

Sumber Data: Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Tahun 2024, diolah

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2024 dapat mencapai target akan tetapi dari capaian target pada tahun 2023 tidak dapat mencapai target maka dilakukan penyesuaian target ditahun 2024, dan untuk tahun 2025 nanti berdasarkan rekomendasi laporan hasil evaluasi yang telah disampaikan akan menjadi dasar bagi Kecamatan Rawalumbu untuk melakukan perbaikan pada point-point yang telah dijelaskan.

Tabel 15 Tabel Perbandingan Capaian Nilai AKIP Kecamatan Rawalumbu dengan Kecamatan di Kota Bekasi

NO	KECAMATAN	TARGET	NILAI AKIP	PERSENTASE (%)	KET
1	Kecamatan Rawalumbu	75,4	77,90	103,32%	
2	Kecamatan Pondok Melati	75	75,14	100,19%	
3	Kecamatan Medansatria	77,86	78,90	101,34%	
4	Kecamatan Pondokgede	75,5	77,14	102,17%	
5	Kecamatan Bekasi Selatan	76	75,16	98,89%	

Sumber Data: Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Tahun 2024, diolah

Berdasarkan data tersebut diatas, terdapat 5 (lima) perbandingan pada Capaian Nilai AKIP dari beberapa Kecamatan di Kota Bekasi. Hal tersebut menunjukan bahwa secara kualitas Nilai AKIP pada setiap Kecamatan dapat melebihi target yang telah ditetapkan pada Tahun 2024 dan ada juga yang tidak dapat mencapai target.

Walaupun pencapaian target pada tahun 2024 dapat tercapai masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki pada tahun berikutnya antara lain :

- a. Menyelaraskan tujuan/sasaran, program/kegiatan/sub kegiatan beserta indikatornya terhadap dokumen Renstra Kecamatan Rawalumbu;
- Belum selarasnya Cascading dengan Renstra;
- Menyelaraskan Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Indikator Sasaran yang tersaji pada Indikator Kinerja Individu (IKI) dengan Perkin.

Kecamatan Rawalumbu masih harus diperlukan perbaikan pada setiap komponen yang menjadi penilaian keberhasilan yang telah dijelaskan, yang antara lain sebagai berikut :

Tabel 16 Indikator Capaian Komponen Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Capaian Nilai AKIP di Kecamatan Rawalumbu

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	Persentase (%)
1	Perencanaan Kinerja	30	23,71	79,03%
2	Pengukuran Kinerja	30	22,63	75,43%
3	Pelaporan Kinerja	15	11,95	79,67%
4	Evaluasi Akuntabiitas Kinerja Internal	25	19,61	78,44%

Sumber: LHE Kecamatan Rawalumbu Tahun 2024

melihat komponen Dengan penilaian diatas. maka ketercapaian indikator sasaran Nilai Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada tahun 2024 dapat diinterprestasikan Sangat Baik dengan memperoleh nilai 77,90 atau predikat Sangat Baik. Akan tetapi walaupun Kecamatan Rawalumbu mendapatkan predikat sangat baik masih ada rekomendasi yang evaluasi oleh Kecamatan Rawalumbu di meningkatkan Nilai AKIP pada Tahun 2024, yaitu antara lain :

- Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan kinerja agar sesuai standar dengan menyelaraskan substansi dokumen perencanaan;
- Meningkatkan kepedulian dan pemahaman pegawai atas pengukuran kinerja sehingga paham dan peduli dengan target capaian yang telah ditetapkan dan diperjanjikan;
- Memperbaiki SOP Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja dengan mempertimbangkan adanya alur data kinerja yang masih perlu disempurnakan;
- Melakukan evaluasi terhadap capaian laporan kinerja tahunan secara internal sebelum laporan ditetapkan untuk memastikan keabsahan data yang tersaji;

 Meningkatkan kualitas evaluasi internal dengan memperbaiki laporan evaluasi internal agar target yang telah diperjanjikan pada Perkin dan Rencana Aksi serta menyelaraskan indikator sub kegiatan dan target kinerjanya yang tersaji pada evaluasi internal dengan Renja;

Capaian indikator Nilai AKIP di Kecamatan Rawalumbu tahun 2024 ini jika dikaitkan dengan target Renstra pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 17 Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Nilai AKIP di Kecamatan Rawalumbu Target Renstra 2024-2026

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Nilai AKIP		
		2024	2026	
Target	Persen	75,4	76	
Realisasi	Persen	77,90	-	

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Rawalumbu Tahun 2024

Jika melihat tabel diatas, capaian indikator Nilai AKIP di Kecamatan Rawalumbu pada tahun 2024 sebesar 79.90 dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2026 sebesar 76, maka Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi pada tahun 2024 ini telah melebihi capaian kinerja Renstra Kecamatan Rawalumbu Tahun 2024-2026. Dengan demikian kedepan harus ada langkahlangkah konkrit dari Kecamatan Rawalumbu mempertahankan capaian kinerja Nilai AKIP di Kecamatan Rawalumbu dengan meningkatkan apa yang menjadi rekomendasi dari Tim Evaluasi sebagaimana yang sudah dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi pada setiap tahunnya.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Nilai AKIP di Kecamatan Rawalumbu Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 18 Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Utama Capaian Nilai AKIP di Kecamatan Rawalumbu

Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rp	Realisasi Anggaran Capaian Kinerja (%)		Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Rp.	%)		
Nilai Akuntabliitas Kinerja Instansi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.272.764.440,00	19.756.901.320,00	92,87%	100%	7,13%
Pemerintah (AKIP)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	2.822.500,00	94,08%	100%	5,92%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00	2.822.500,00	94,08%	100%	5,92%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.399.996.000,00	9.656.648.883,00	92,85%	100%	7,15%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.396.996.000,00	9.653.867.883,00	92,85%	100%	7,15%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	2.781.000,00	92,70%	100%	7,30%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	100%	0,00%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	100%	0,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	549.973.000,00	524.141.690,00	95,30%	100%	4,70%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	19.290.000,00	96,45%	100%	3,55%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	251.000.000,00	246.183.800,00	98,08%	100%	1,92%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,00	24.794.300,00	82,65%	100%	17,35%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00	14.400.000,00	72,00%	100%	28,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	218.973.000,00	209.598.590,00	95,72%	100%	4,28%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000,00	9.875.000,00	98,75%	100%	1,25%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	412.836.000,00	397.762.000,00	96,35%	100%	3,65%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	412.836.000,00	397.762.000,00	96,35%	100%	3,65%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.441.959.440,00	8.793.040.537,00	93,13%	100%	6,87%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.000.000,00	245.340.831,00	70,10%	100%	29,90%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.091.959.440,00	8.547.699.706,00	94,01%	100%	5,99%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	455.000.000,00	372.485.710,00	81,86%	100%	18,14%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.000.000,00	55.932.362,00	58,88%	100%	41,12%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	135.000.000,00	97.799.600,00	72,44%	100%	27,56%

_	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rp	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Operasional atau Lapangan					
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	22.801.000,00	91,20%	100%	8,80%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	195.952.748,00	97,98%	100%	2,02%

Sumber Data: Siencang.bekasikota.go.id Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) program, 7 (tujuh) Kegiatan dan 17 (tujuh belas) Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Nilai Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dimana pagu anggaran Rp. 21.272.764.440 (dua puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 19.756.901.320,- (Sembilan belas milyar tujuh ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah), dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Nilai Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mencapai 92,87 persen yang jika dikaitkan dengan capaian Nilai Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) memperoleh nilai sebesar 77,90 dari target sebesar 75,4, atau dengan capaian kinerja sebesar 103,32 persen, maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan efisien dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 7,13 persen, karena meskipun terdapat sisa anggaran tetapi capaian kinerja dapat terlaksana dan ini juga diartikan bahwa Kecamatan Rawalumbu dapat meningkatkan capaian kinerja dari capaian kinerja tahun sebelumnya.

Adapun terkait dengan efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian Nilai Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berdasarkan Analisis Beban Kerja terdapat 2 (dua) orang yang bertanggungjawab dalam menganalisa data dan informasi untuk merumuskan program, kegiatan dan target capaian pada Nilai Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan capaian target.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama Nilai Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah sebagai berikut:

- a. Lebih meningkatkan lagi tentang Perencanaan Kinerja dalam menentukan target yang akan dicapai pada tahun berikutnya;
- Melakukan Metode Pengukuran Kinerja yang berkesinambungan dengan mekanisme pengumpulan data yang berdasarkan SOP agar data yang diberikan valid serta memberikan kemudahan dalam menelusuri sumber datanya;
- c. Pelaporan Kinerja yang dapat dijadikan dasar dalam pemberian Reward and Punishment yang akan dilakukan rutin setiap semester atau triwulan.

Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakatyang didukung oleh Kohesi sosial yang kuat

3.2.3 Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan bahwa untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dibutuhkan keseimbangan dan keselarasan antara ketertiban, kebersihan dan keindahan. Pembangunan suatu Kota akan terwujud dan dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat dalam kondisi yang

baik, bersih, indah, dan cermin adanya kebersihan, keindahan dan ketertiban merupakan modal bagi suatu pembangunan.

Kecamatan Rawalumbu sebagai salah satu kecamatan yang ada di Kota Bekasi sekaligus kecamatan yang memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan ibu kota Negara Republik Indonesia menjadi cerminan Kota Bekasi terutama dalam hal penerapan wilayah K3.

Berdasarkan hasil dari pemantauan Zona Tertib pada Tahun 2023 maka pada Tahun 2024 telah ditetapkan sebanyak 10 (sepuluh) titik zona tertib untuk mendukung sasaran strategis Kecamatan Rawalumbu yang setiap bulannya dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Kecamatan Rawalumbu agar dapat tercapai dan dapat dikelola dengan sangat baik.

Pada Tahun 2024 ini zona tertib hanya ditetapkan sebanyak 10 titik dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebanyak 25 titik pantau maka pada tahun 2024 berkurang sebanyak 15 titik pantau dikarenakan pada 15 titik yang sebelumnya telah cukup baik dalam menjaga penerapan K3 diwilayahnya, sedangkan 10 titik yang menjadi target pada tahun 2024 ini masih terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam penerapan K3 sehingga menjadi fokus Kecamatan Rawalumbu untuk menerapkan K3 agar wilayah Kecamatan Rawalumbu dapat mencapai target pada Renstra Tahun 2024-2026.

Berdasarkan penetapan zona tersebut, pada tahun 2024 dilakukan penilaian terhadap 2 titik yang telah ditetapkan. Hasil penilaian tim penilai sebagai berikut :

Tabel 19 Kertas Kerja Hasil Penilaian Zona Tertib

	No	Zona	Kategori
Ī	1	Jl. Raya Siliwangi (Depan Kantor Kecamatan)	Baik
	2	Jl. Mawar (Kantor Kelurahan Pengasinan)	Baik

Dengan demikian pada tahun 2024 terdapat 2 zona dari 10 zona yang akan dimonitoring dan evaluasi pada tahun 2024. Sehingga dapat diambil kesimpulan capaian indikator Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib dapat dilihat sebagaimana berikut:

Tabel 20 Zona Tertib Yang Telah Berkategori Baik

No	Zona Tertib		Tahun	
NO	Zona Tertib	2024	2025	2026
1	Jl. Pramuka			1
2	Jl. Raya Siliwangi (Depan Kantor Kecamatan)	1		
3	Jl. Pelabuhan Ratu Raya (Kantor Kelurahan Sepanjangjaya)		1	
4	Jl. Mawar (Kantor Kelurahan Pengasinan)	1		
5	Jl. Dasa Darma (Kantor Kelurahan Bojong Rawalumbu)			1
6	Jl. Cipendawa (Kantor Kelurahan Bojong Menteng)		1	
7	Jembatan 1-3 Kelurahan Sepanjangjaya			1
8	Jembatan 1-3 Kelurahan Pengasinan		1	
9	Jembatan 4-9 Kelurahan Bojong Rawalumbu			1
10	Jl. Raya Siliwangi (Perbatasan dengan Bantar Gebang)			1
	JUMLAH	2	3	5
	Persentase Capaian Per Triwulan	20%	30%	50%
	Total Zonasi yang tercapai	2	5	10
	Total Persentase Capaian	20%	50%	100%

Sumber : Laporan Hasil Penilaian Zona Tertib Kecamatan Rawalumbu Tahun 2024

Tabel 21 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib di Kecamatan Rawalumbu

	Indikator		Tahur	Tahun 2024		
No	Sasaran Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja Tahun 2024	
1	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	Persen	20	20	100%	

Sumber: Laporan Hasil Penilaian Zona Tertib Kecamatan Rawalumbu Tahun 2023

Dengan melihat pada tabel diatas bahwa target tahun 2024 sebesar 20 Persen, sementara realisasi mencapai 20 Persen maka capaian kinerja tahun 2024 atas indikator Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib sebesar 100 persen, maka capaian Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib pada Tahun 2024 telah tercapai. Dengan demikian pada tahun 2024 sebanyak 2 zona di Kecamatan Rawalumbu yang telah tertib dari target sebanyak 10 titik zona.

(Jumlah Zonasi yang telah ditertibkan/Jumlah Zona Tertib) x 100% = 20%

Faktor penentu keberhasilan pencapaian indikator Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib di Kecamatan Rawalumbu ini yaitu :

1. Penentu tercapainya target yang telah ditetapkan adalah dengan melaksanakan kegiatan penertiban secara rutin disetiap titik yang telah ditetapkan dengan melibatkan 3 pilar dengan Polsek dan Koramil serta Satpol PP yang dilaksanakan setiap triwulan dan rutin dilakukan monitoring serta penertiban oleh Satpol PP disetiap harinya serta selain itu terdapat wadah pengaduan yang lebih memudahkan melakukan penindakan secara cepat.

Keberhasilan pencapaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib di Kecamatan Rawalumbu sehingga jauh melampaui target karena didukung oleh indikator capaian program pada Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan sebagai berikut:

Tabel 22 Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib di Kecamatan Rawalumbu

				n 2023	Capaian	Tahun 2024		Capaian
No	Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja Tahun 2023		Realisasi	Kinerja Tahun 2024
	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	%	84	84	100%	20	20	100%

Dengan melihat indikator program yang telah tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib di Kecamatan Rawalumbu pada tahun 2024 dengan Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib pada Tahun 2024 yang dapat terlihat dari Indikator Program Persentase Wilayah yang Tertib dimana pada tahun 2024 dengan target dan realisasi capaian sebesar 20%. Capaian indikator Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib di Kecamatan Rawalumbu tahun jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 23 Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib di Kecamatan Rawalumbu Target Renstra 2024-2026

Capaian Indikator	Satuan	Persentase Penin yang T		
Kinerja Sasaran		2024	2026	
Target	Persen	20	33	
Realisasi	Persen	20	-	

Jika melihat tabel diatas, realisasi indikator Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib di Kecamatan Rawalumbu pada tahun 2024 sebesar 20%, maka Kecamatan Rawalumbu telah mampu memenuhi target capaian kinerjanya. Dengan demikian kedepannya harus ada langkah-langkah konkrit dari Kecamatan Rawalumbu untuk meningkatkan capaian kinerja Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib di Kecamatan Rawalumbu agar pada tahun 2024 seluruh titik yang telah ditetapkan sebanyak 10 titik dapat terealisasi dan terkelola ketertibannya dengan baik, diantaranya:

- Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar berperan aktif dalam giat bersih lingkungan karena mulai tahun 2024 sasaran zona sudah masuk ke jalan/titik utama di Kecamatan Rawalumbu;
- Penguatan sinergitas 3 pilar dan Forkompimcam dalam mewujudkan zona tertib;
- 3. Melakukan reviu terhadap instrument penilaian agar memudahkan dalam mengevaluasi tata cara penilaian.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib di Kecamatan Rawalumbu Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 24 Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib di Kecamatan Rawalumbu

	Drogram / Kosintan / Sub		Realisasi Angg	jaran	Capaian	Tingkat
Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rp	Rp.	. (%)		Efisiensi
Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1.208.600.000,00	1.171.794.800,00	96,95%	100%	3,05%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.208.600.000,00	1.171.794.800,00	96,95%	100%	3,05%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	80.000.000,00	76.964.800,00	96,21%	100%	3,79%
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	63.000.000,00	63.000.000,00	100,00%	100%	0,00%
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Pengasinan	280.000.000,00	279.520.000,00	99,83%	100%	0,17%
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Bojong Rawalumbu	380.000.000,00	348.360.000,00	91,67%	100%	8,33%
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Sepanjangjaya	162.000.000,00	162.000.000,00	100,00%	100%	0,00%
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Bojong Menteng	243.600.000,00	241.950.000,00	99,32%	100%	0,68%

Sumber Data: Siencang.bekasikota.go.id Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 1 program, 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan yang terdapat mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib di Kecamatan Rawalumbu, dimana pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 1.208.600.000 (satu milyar dua ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.171.794.800, (satu milyar seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib di Kecamatan Rawalumbu 96,95 persen.

Jika dikaitkan dengan realisasi Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib di Kecamatan Rawalumbu sebesar 20 persen dari target nilai sebesar 20 persen, atau dengan capaian kinerja sebesar 100 persen, dengan serapan anggaran sebesar 96.9% maka dapat dikatakan terdapat efisiensi penggunaan penggunaan sumber daya dengan tingkat efisiensi sebesar 3,05 persen, karena meskipun terdapat efisiensi anggaran yang cukup besar, tetapi capaian kinerja dapat target. Hal tersebut dikarenakan Kecamatan mencapai Rawalumbu melakukan beberapa upaya efisiensi yaitu :

- Melaksanakan kegiatan penertiban dengan peralatan swadaya dari masyarakat dan aparatur yang terlibat;
- Keterlibatan seluruh aparatur dalam melaksanakan K3 serta keikutsertaan masyarakat dan 3 Pilar yang berada di Kecamatan Rawalumbu dalam pelaksanaan kegiatan penertiban.

3.3 Realisasi Anggaran

Capaian Kinerja pada Kecamatan Rawalumbu berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 berjalan sesuai dengan Output dan Outcome sudah dicapai dan tidak mengalami permasalahan dan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program kerjanya ditunjang dari sisi pendanaan pada tahun anggaran 2024. Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi pada tahun anggaran 2024 menggunakan dana Anggaran Pendapan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi dengan perincian sebagai berikut:

Dana APBD **Rp. 32.038.315.840,-**

Tabel 25 Pagu Anggaran Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Per Program Tahun 2024

	Urusan / Bidang Urusan	Pagu Anggaran		
No	Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp.)	Setelah Perubahan	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		21.272.764.440	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	146.342.000	100.768.000	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	9.316.183.400	9.436.183.400	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	20.000.000	20.000.000	
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.208.600.000	1.208.600.000	
	Total	32.078.315.840	32.038.315.840	

Alokasi Anggaran Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi pada Tahun 2024 sebelum perubahan sebesar **Rp. 32.078.315.840,-** dan setelah perubahan sebesar **Rp. 32.038.315.840,-** realisasi yang sudah terlaksanakan pada Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi adalah sebesar **Rp. 30.425.567.020,-** yang terdiri atas :

Tabel 26 Realisasi Anggaran Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Per Program
Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		19.756.901.320	92,87%	7,13%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100.768.000	91.558.000	90,86%	9,14%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	9.436.183.400	9.388.107.900	99,49%	0,51%
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	20.000.000	17.205.000	86,03%	13,98%
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.208.600.000	1.171.794.800	96,95%	3,05%
	Total	32.038.315.840	30.425.567.020	94,97%	5,03%

Pada sasaran strategis Kecamatan Rawalumbu dengan indikator diatas hampir keseluruhan target yang telah ditetapkan telah tercapai, realisasi anggaran pada Tahun 2024 sebesar Rp. 30.425.567.020,- dari pagu sebesar Rp. 32.038.315.840,- ada beberapa kegiatan yang capaian target keuangan tidak tercapai akan tetapi capaian fisik kegiatan tersebut telah tercapai 100% dengan tidak mengurangi kualitas kegiatan yang dilaksanakan dan tidak mengurangi laporan yang harus tetap tercapai disetiap bulan dan triwulan.

Dijelaskan pada *Tabel 30* bahwa tingkat efisensi anggaran pada Kecamatan Rawalumbu mencapai 5,03%, dalam pelaksanaan setiap kegiatan untuk menunjang tercapainya target yang telah ditetapkan pada setiap sasaran terdapat efisiensi anggaran dan efisiensi sumber daya manusia, antara lain :

1. Nilai AKIP Kecamatan Rawalumbu

Pada sasaran Nilai AKIP Kecamatan Rawalumbu terdapat efisiensi anggaran sebesar 7,13% dimana efisiensi tersebut sebagian besar didapatkan dari hasil negosiasi pada pelaksanaan setiap sub kegiatan yang dilakukan secara kontraktual.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Pada sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik terdapat efisiensi anggaran sebesar 9,14% yang didapatkan dari hasil negosiasi pada pelaksanaan setiap sub kegiatan yang dilakukan secara kontraktual dan ada beberapa alokasi anggaran yang tidak diserap dikarenakan kegiatan telah terlaksana secara keseluruhan.

4. Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib Pada sasaran Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib terdapat efisiensi anggaran sebesar 3,05% yang didapatkan dari hasil negosiasi pada setiap pelaksanaan sub kegiatan yang dilakukan secara kontraktual.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan Umum

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan tingkat pencapaian sasaran gambaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban vang ditetapkan Kecamatan Rawalumbu atas penyelenggaraan program kegiatan pada Tahun 2024 yang sekaligus menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Rawalumbu telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas 2024 sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun ini Kecamatan Rawalumbu memiliki 3 (tiga) sasaran strategis serta 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target. Sementara apabila dibandingkan dengan target perencanaan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD), maka terlihat bahwa pada tahapan renstra tahun 2024 ini hampir keseluruhan target yang telah ditetapkan telah tercapai, bahkan ada beberapa yang melebihi target. Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Rawalumbu Tahun 2024-2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 terpenuhi sesuai dengan harapan.

Berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 berjalan sesuai dengan Output dan Outcome sudah dicapai dan tidak mengalami permasalahan dan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program kerja.

4.1.1 Simpulan Capaian Kinerja

Alokasi anggaran Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi pada tahun 2024 sebesar **Rp. 32.038.315.840,-** terdiri dari Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) Rp. **21.272.764.440,-** dan Belanja Langsung Urusan (BLU) **Rp. 10.765.551.400,-**. Seluruh Kegiatan sampai dengan akhir Desember 2024 dengan realisasi fisik 100%.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan capaian kinerja Kecamatan Rawalumbu Tahun 2024, terdapat hal-hal yang perlu dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja di tahun berkutnya mengingat Tahun 2024 adalah tahun terakhir periode Renstra 2024-2026. Beberapa hal yang telah dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja tersebut diantaranya:

- LKIP Kecamatan Rawalumbu merupakan hasil pertanggungjawaban instansi pemerintah atas kinerja yang telah dicapai, oleh karena itu penyusun berharap adanya dukungan kerjasama antara berbagai pihak khususnya di Kecamatan Rawalumbu agar terjalin komunikasi yang baik.
- 2. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi terutama dalam penyusunan Program yang ada di Kecamatan Rawalumbu agar dapat mempertimbangkan perkembangan isu strategis/perubahan regulasi lokal, regional, dan nasional, sehingga dapat dengan cepat dilakukan penyesuaian kebijakan sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan dari Wali Kota kepada Camat;

3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur disamping mekanisme pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh dalam menghasilkan capaian kinerja yang berkualitas, hal penting lainnya adalah kapasitas sumberdaya aparatur yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Meningkatkan kualitas data dan informasi atas capaian kinerja. Capaian kinerja yang dikumpulkan sesuai dengan SOP pengumpulan data kinerja merupakan salah satu strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan yang selaras dengan dokumen Renstra Kecamatan Rawalumbu Tahun 2024-2026 serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Dalam hubungan ini masyarakat umum perlu dilibatkan untuk berpartisipasi dan mempunyai informasi yang cukup tentang tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi mulai perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari tingkat kelurahan dan kecamatan, berperan serta dalam monitoring dan evaluasi.

Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 ini dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja kita dimasa yang akan datang.